

Edisi:

#02

Maret,

PENGANGGARAN HIJAU NEWSLETTER

Memasukkan aspek lingkungan ke dalam proses
penganggaran.

Tentang Edisi Ini

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI) berupaya untuk mendorong efektivitas implementasi penganggaran hijau (green budgeting)—salah satu ujung tombak bagi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Rangkaian kegiatan yang direncanakan oleh LPEM FEB UI dan MCAI untuk mengimplementasikan penganggaran hijau sudah mulai dilaksanakan satu per satu. Sesuai dengan tujuan, kegiatan dilakukan di level nasional maupun daerah. Hingga Maret 2016, telah dilakukan studi literatur atas kebijakan terkait dengan lingkungan di negara-negara lain serta studi lapangan di empat provinsi yang menjadi sampel penelitian (Jambi, NTT, NTB, Sulbar). Dari studi literatur, tim peneliti dapat mempelajari berbagai opsi kebijakan yang sudah pernah dilaksanakan dan memilih yang terbaik. Dari studi lapangan, tim peneliti mendapatkan gambaran akurat mengenai kondisi lingkungan saat ini di berbagai daerah di Indonesia.

Hasil studi literatur dapat Anda baca pada edisi ini. Tim peneliti telah mereview berbagai kebijakan dalam bidang pengelolaan limbah, energi (energi terbarukan, transportasi, dan industri), serta lahan yang sudah diterapkan di berbagai negara. Di harapkan, dari studi ini tim peneliti mendapatkan opsi-opsi kebi-

jakan yang dapat diadaptasi dan diterapkan secara efektif di Indonesia.

Untuk melengkapi hasil dari studi literatur, maka studi lapangan juga dilakukan oleh tim peneliti yang terjun langsung melaksanakan survei pada penduduk desa di empat provinsi sampel. Segala informasi terkait lingkungan di tingkat rumah tangga berhasil didapatkan dan dapat Anda baca pada edisi ini. Hasil studi lapangan ini akan menjadi dasar bagi langkah selanjutnya, yaitu merumuskan kebijakan, khususnya yang akan diimplementasikan di tingkat daerah. Diharapkan dengan data yang akurat, kebijakan yang dibuat dapat menasar kebutuhan unik masing-masing daerah sehingga kebijakan dapat berjalan efektif.

Selain itu, Anda dapat membaca partisipasi LPEM dalam menyosialisasikan penganggaran hijau pada Forum Kepala Bappeda se-KTI ke-XI.

Selamat membaca,
Tim Peneliti



Opsi-Opsi Kebijakan Terbaik untuk Implementasi Penganggaran Hijau

Istilah penganggaran hijau bisa mengacu pada serangkaian *tools* yang digunakan untuk mempersiapkan rencana anggaran hijau yang terpisah ketika sebuah organisasi (atau negara) mempersiapkan rencana anggaran tahunan. Penganggaran hijau juga bisa merujuk pada filosofi atau upaya untuk mengubah aktivitas penganggaran menjadi suatu mekanisme yang membentuk pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Energyprofessional (2009) menyatakan bahwa penganggaran hijau adalah proses dimana tiga aspek dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, keseimbangan ekologi, dan kemajuan sosial, disatukan dalam sebuah kebijakan yang terpadu. Kebijakan terpadu tersebut meliputi empat sektor, yaitu pengolahan limbah, energi, transportasi, dan lahan.

Pengolahan limbah merupakan tantangan di Indonesia karena jumlah penduduknya yang mencapai lebih dari 218,8 juta. Pada tahun 2006, rata-rata sampah yang dihasilkan Indonesia adalah 0,6 kg/kapita/hari untuk daerah perkotaan dan 0,3 kg/kapita/hari untuk daerah pedesaan. Di negara maju, metode yang digunakan adalah daur ulang, pengomposan, pengolahan biologis mekanis, *incineration* atau pembakaran, serta *landfill* atau pengumpulan gas metan. Sayangnya, di negara berkembang beberapa opsi tersebut sulit diterapkan karena kurangnya biaya dan teknologi. Karenanya, opsi yang direkomendasikan di Indonesia adalah pengolahan sampah dengan teknologi rendah atau menengah. Contohnya dengan pemasangan *septic tank* dan daur ulang air, pembuatan tempat pembuangan sampah tertutup untuk mengumpulkan gas metan, dan penyuluhan pembuatan kompos dari sampah organik.

Di bidang energi, Indonesia sebagai negara berkembang belum bisa mencurahkan 100% perhatian pada kebijakan untuk mengefisien energi karena masih memiliki daerah yang belum terpenuhi kebutuhan energinya. Indonesia masih perlu memastikan seluruh kebutuhan energi penduduknya terpenuhi terlebih dahulu. Karena alasan ini juga, pengembangan energi alternatif belum bisa optimal karena Pemerintah masih memprioritaskan proyek dengan dana yang paling rendah. Untuk meny-

kapi kondisi ini, kebijakan yang mungkin dilakukan adalah dengan tetap meneruskan Rancangan Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang telah dibuat oleh BAPPENAS, diantaranya dengan memprioritaskan penggunaan panas bumi dan batu bara.

Bidang ketiga, transportasi, juga mendesak untuk ditangani karena menyumbang 23% dari total emisi karbon dari sektor energi (BAPPENAS, 2010). 90% dari emisi transportasi ini berasal dari kendaraan darat, yang sulit dikurangi karena merupakan penghubung utama antardaerah. Karena itu, ada tiga pendekatan yang diusulkan untuk bidang transportasi, yaitu pendekatan penghindaran (melaksanakan *trip demand management* di perkotaan untuk menghindari rute yang tidak perlu), pendekatan beralih (dari kendaraan boros BBM ke yang hemat BBM), dan pendekatan peningkatan (menggunakan teknologi canggih yang lebih hemat energi).

Menurut BAPPENAS, sektor berbasis lahan adalah sumber emisi karbon terbesar di Indonesia dengan kontribusi sebesar 67%. Namun, menangani sektor ini membutuhkan kehati-hatian ekstra karena sektor ini menyerap 34% tenaga kerja nasional dan memberi kontribusi PDB sebesar kira-kira 15% (BAPPENAS, 2011). Karenanya, cara yang direkomendasikan untuk menghijaukan sektor ini adalah melalui rencana yang pernah diberikan BAPPENAS, dimana tujuannya akan dibagi menjadi dua, yaitu (i) mencegah turunnya stok karbon dan (ii) meningkatkan stok karbon.

Seluruh opsi yang diajukan ini nantinya akan dicocokkan dengan data lapangan untuk dilihat kemungkinan keberhasilannya. Tapi sesungguhnya, berhasil atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan bukan hanya bergantung pada kebijakannya itu sendiri, tapi juga pada agen yang mengimplementasinya. Karena itu, perlu ditanamkan juga pemikiran hijau atau *green thinking* pada pihak-pihak yang terlibat, mulai dari pembuat kebijakan hingga yang melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan kesadaran penuh akan pentingnya pemikiran hijau, maka target pengurangan emisi karbon pada akhir tahun 2020 pun bukan mustahil untuk dicapai.



Fakta Lapangan: Seberapa Hijau Indonesia Saat Ini?

Untuk menggali informasi yang lebih lengkap dan akurat, Tim Peneliti dari LPEM FEB UI berangkat menuju empat provinsi yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu Jambi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Barat pada bulan Desember 2015. Informasi dikumpulkan langsung dari rumah tangga yang berada di desa-desa yang dipilih melalui beberapa kriteria.

Para peneliti mensurvei seluruh informasi yang akan diperlukan dalam penelitian. Informasi tersebut meliputi penggunaan dan konversi lahan, pengolahan limbah, transportasi, sumber dan penggunaan air bersih, sumber dan penggunaan energi, serta ketersediaan dana bantuan Pemerintah.

Penggunaan dan Konversi Lahan

Kebanyakan desa yang diteliti menggunakan sebagian lahannya untuk keperluan pertanian dan perkebunan, meskipun ada juga desa yang wilayahnya didominasi oleh area nonpertanian dan nonperkebunan. Konversi lahan, dari pertanian ke nonpertanian atau sebaliknya hampir tidak dapat ditemukan di semua provinsi dalam satu tahun terakhir, kecuali hanya dalam jumlah kecil.

Kebutuhan Energi dan Kesadaran Pemakaian Energi

520 desa yang disurvei memiliki berbagai variasi kondisi. Ada desa yang 100% kebutuhan listriknya sudah dipenuhi PLN, namun ada juga yang belum memiliki aliran listrik sama sekali. Sebagian kecil dari penduduk yang tidak mendapat aliran listrik dari PLN memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga dengan membeli bahan bakar dan menghidupkan generator sendiri.

Hampir semua desa tidak menggunakan sumber energi alternatif, namun ada beberapa desa yang sebagian kecil penduduknya

menggunakan sumber energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, sebagian besar desa yang disurvei belum menggunakan lampu hemat energi di rumahnya dan memilih memakai lampu pijar. Alasannya antara lain karena belum tahu pentingnya lampu hemat energi, susah dicari, dan mahal.

Moda Transportasi

Sebagian besar penduduk desa yang disurvei memiliki dan menggunakan sepeda motor untuk pergi ke tempat kerja. Sebagian kecil tidak menggunakan kendaraan apa pun atau jalan kaki karena jarak dengan tempat kerja dekat. Yang menggunakan kendaraan umum jumlahnya lebih jarang daripada yang menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki.

Kebutuhan Air Bersih dan Pengolahan Air Kotor

Sebagian desa berlangganan air PDAM untuk keperluan air sehari-hari. Sebagian lagi menggunakan sumber air alami, sumur pribadi, sumur desa, atau sungai. Sementara itu, pengolahan air kotor untuk didaur ulang belum ada di semua desa. Air kotor dibuang begitu saja di sungai atau tanah.

Pengolahan Limbah

Hampir semua desa tidak menyortir sampah menjadi organik dan nonorganik sebelum dibuang. Sebagian desa sudah dilayani oleh sistem pembuangan sampah, dimana penduduk menyiapkan tempat sampah sendiri untuk kemudian diambil petugas pengumpul sampah dan dibuang ke TPA. Namun, sebagian lagi belum terjangkau oleh fasilitas tersebut dan sampah hanya dibuang begitu saja di tanah atau sungai. Cara lain yang juga sering dipakai oleh penduduk desa adalah dengan membakar sampah.

Dana Bantuan Pemerintah dan Program Pemberdayaan

Desa yang menerima dana bantuan sudah lebih banyak dari yang belum. Namun, evaluasi penggunaan dana bantuan ini tidak tersedia. Sebagian desa juga sudah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang umumnya dibiayai oleh APBD, meskipun sebagian lagi belum. Evaluasi hasil dari kegiatan pemberdayaan ini juga belum tersedia.

Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa banyak wilayah di Indonesia yang masih belum memahami, apalagi menerapkan pemikiran hijau. Mengingat Indonesia memang merupakan negara yang sedang berkembang, hal ini wajar saja terjadi. Yang terpenting, kebijakan yang nantinya dibuat untuk mencapai target pengurangan emisi karbon pada 2020 dibuat dengan mempertimbangkan kondisi sebenarnya yang ada di masyarakat.

Event



Forum Kepala BAPPEDA Provinsi se-KTI XI “Implementasi Tol Laut dan Penganggaran Hijau untuk Mendukung Percepatan Pembangunan”

Setiap tahunnya, Kepala BAPPEDA dari seluruh provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia mengadakan pertemuan untuk memperlan- car kerja sama dan koordinasi. Tidak terkecuali tahun 2016 yang menjadi tahun ke-XI diselenggarakannya Forum Kepala BAPPEDA Provinsi se-KTI. Kali ini, pertemuan diadakan di Hotel Arya Duta Jakarta, pada tanggal 2 Maret 2016. Pertemuan kali ini mengangkat tema “Implementasi Tol Laut dan Penganggaran Hijau untuk Mendukung Percepatan Pembangunan”. Acara ini dihadiri oleh Kepala BAPPENAS Bidang Pengembangan Regional, Dr. Ir. Ariefin Rudiyanto, MSc; Direktur Lingkungan Hidup BAPPENAS, Ibu Wahyuningsih Daradjati; Ketua Kelompok Kerja KTI, Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS; Perwakilan MCA Indonesia, Poppy Ismalina; serta Direktur Eksekutif Yayasan Bakti, Caroline Tupamahu.

LPEM FEB UI pun turut berkontribusi pada acara ini dengan berpartisipasi. Ibu Riatu M. Qibtiyyah selaku Kepala Bidang Penelitian LPEM memberikan presentasi mengenai penganggaran hijau. Pada dasarnya, penganggaran hijau adalah sebuah gagasan praktis tentang penerapan pembangunan berkelanjutan dalam sistem anggaran, yang terintegrasi dalam sebuah dokumen kebijakan yang didasarkan pada prinsip berkesinambungan secara finansial, sosial, dan lingkungan. Penganggaran hijau ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai target penurunan emisi karbon sebesar 26% pada tahun 2020 sesuai mandat Presiden Yudhoyono pada tahun 2011.

Ibu Wahyuningsih Daradjati menjelaskan bahwa Presiden Yudhoyono telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang selanjutnya diadopsi oleh pemerintah provinsi dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Namun, agar tujuan skala nasional ini tercapai, implementasi kebijakan tidak boleh berhenti hanya pada level provinsi. “RAD-GRK yang dibuat oleh provinsi bukan cuma harus ditaati oleh pemerintah level provinsi saja, tapi juga harus diimplementasi oleh pemerintah di tingkat kabupaten atau kota,” tutur beliau.



Contact Person:

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat.

Telp. (021) 314-3177 Fax. (021) 319-343-10

Email: penganggaranhijau@lpe-feui.org | riatu.mariatul@ui.ac.id
penganggaranhijau@gmail.com

Tim Peneliti:

Riatu M. Qibtiyyah, Cita Wigjoseptina, Devina Anindita, Farma Mangunsong, Ledi Trialdi, Lili Yunita, Nia Kurnia, Sulistiadi Dono Iskandar, Yusuf Sofiyandi Simbolon

Desain: Yuanita Intan